

LAPORAN PENELITIAN

PERANAN LKMD DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Oleh :

Drs. H. Nasrul Sumar
(Ketua Tim Peneliti)



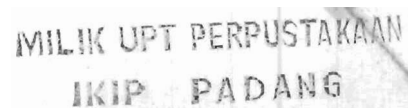
Penelitian ini dibiayai oleh :

Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang
Tahun Anggaran 1991/1992

Surat Perjanjian Kerja No. : 42/PT37.H9/N.2.2/1991
Tanggal 13 September 1991

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1992



PERANAN LKMD DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERSONALIA PENELITIAN

Ketua : Drs.H.Nasrul Sumar

Anggota : Drs.Abdul Manaf Tahir, M.S

Drs.Yunia Wardi



ABSTRAK

1990
430
/5

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), merupakan suatu lembaga pendamping dari lembaga pemerintahan desa, ia berfungsi sebagai perencana pembangunan, penggerak dalam pembangunan desa dan menumbuhkan rasa dinamis dalam ketahanan desa. Maka keberadaannya yang ditetapkan dengan Kepres No.28 tahun 1980, sangat diharapkan memperlancar pelaksanaan program pembangunan desa. Setelah 10 tahun lembaga ini mendampingi pemerintahan desa sudah sepantasnya diadakan semacam evaluasi, untuk melihat, apakah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ini/LKMD dapat meragakan dirinya sesuai dengan fungsi yang diembannya itu.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas maka studi ini diadakan dengan daerah cash studi Kabupaten Padang Pariaman. Berangkat dari permasalahan tersebut dikemukakan hipotesis yang berbunyi sebagai berikut : " LKMD sebagai wadah Pembangunan Desa telah mampu berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pedesaan di Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk melaksanakan studi ini ditarik sampel sejumlah 25 Desa yang di ambil secara cluster sampling dengan responden 4 orang setiap desa, yakni Kepala Desa, dan tiga orang pemuka masyarakat yang terdiri dari wakil ninik mamak, wakil cadiek pandai dan wakil alim ulama.

Data yang terkumpul dikelompokkan atas kriteria ukuran dua peubah yakni, Aktivitas LKMD yang berperan sebagai peubah

bebas dan gerakan partisipasi masyarakat desa sebagai peubah terikat. Data diolah dan dianalisis dengan model regresi sederhana untuk menguji tingkat keberartian pengaruh aktivitas LKMD terhadap tingkat gerakan partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan pedesaan.

Hasil analisis telah menemukan secara umum bahwa tingkat Aktivitas LKMD berada pada level cukup dan begitu juga tingkat gerakan partisipasi masyarakat Desa terhadap proses pembangunan desa berada pada level cukup. Namun demikian - dalam uji hipotesis terbukti bahwa tingkat aktivitas LKMD yang cukup tersebut hampir-hampir tidak ada kaitannya dengan tingkat partisipasi masyarakat, tapi nyatanya tidak signifikan pengaruh peubah bebas tersebut dengan peubah terikat.

Berkaitan dengan penemuan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan atau aktivitas LKMD di Pedesaan kabupaten Padang Pariaman relatif priodik atau musiman. Dalam hal ini berarti LKMD hanya sebagai pelaksana fasilitas-fasilitas pembangunan dalam pelaksanaan bantuan desa dan disamping itu juga hanya berfungsi menjembatani gerakan-gerakan manunggal sekato dan ABRI masuk desa sebagai pelaksana TOP Down Planning dari pemerintahan daerah. Mereka yang diharapkan pembuat dan pelaksana Bottom Up Planning belum menjadi kenyataan di Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu dalam studi ini disarankan agar pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan fungsi pembangunan desa mengadakan latihan-latihan dan penataran untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan fungsi-fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

PENGANTAR

Penelitian merupakan salah satu karya ilmiah di perguruan tinggi. Karya ilmiah ini harus dilaksanakan oleh dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu, baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya dapat ditingkatkan..

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari Tim Penilai Usul dan Laporan Penelitian Puslit IKIP Padang.

Padang, Februari 1992
Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang,

Dr. Zainil, M.A.
NIP 130187088

D A F T A R I S I

A b s t r a k	i
Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Bab I. P E N D A H U L U A N		
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Studi	6
Bab II. TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS		
A. Tinjauan Teoritis	7
B. H i p o t e s i s	16
Bab III. METHODOLOGI PENELITIAN		
A. Populasi dan Sampel	17
B. Konsep Peubah dan Pengukuran	19
C. Teknik Pengumpulan Data	20
D. Teknik Analisis	21
E. Uji Hipotesis	22
Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A. Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan	31
Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN		
A. Kesimpulan	33
B. Saran-Saran	34
Daftar Perpustakaan	35
Lampiran 1	37
Lampiran 2	38



Daftar Tabel

Nomor		Halaman
1.	Populasi Penelitian	17
2.	Distribusi Frekuensi Skor Aktivitas LKMD di Desa contoh Kabupaten Padang Pariaman	24
3.	Distribusi Frekuensi Skor Gerakkan Partisipasi Masyarakat di Desa Contoh Kab.Padang Pariaman	26
4.	Analisis Regresi Aktivitas LKMD dan Gerakkan Partisipasi Masyarakat Desa di Kabupaten Pa - dang Pariaman.	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya yang dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan. Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang, saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang dengan tujuan untuk mengujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan di segala bidang tersebut mencakup beberapa aspek kehidupan masyarakat, antara lain aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek pertahanan dan keamanan. Di samping pembangunan secara sektoral dilaksanakan pula pembangunan secara regional dan lintas sektoral. Pembangunan bukan hanya ditekankan untuk membangun wilayah perkotaan, tetapi dalam rangka pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, maka pembangunan harus disebar sampai ke pedesaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pembangunan pedesaan.

Gerak langkah pembangunan pedesaan di Indonesia secara lebih terarah dimulai sejak awal Pelita I yang dituangkan dalam surat keputusan Mendagri No : 42 tahun 1969. Berlandaskan Trilogi Pembangunan, maka pembangunan pedesaan di Indonesia mutlak harus dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) 60 persen dari penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan

dengan tingkat hidup yang cukup memperhatikan (BPS, 1990. (2) Desa merupakan sumber-sumber yang potensial bagi pembangunan yang masih terpendam yang belum diolah dan dikembangkan, seperti sumber tenaga kerja murah, kaya dengan sumberdaya alam. Disamping itu secara non fisik desa memiliki aspek positif yang dapat dikembangkan dalam menunjang pembangunan, seperti jiwa kebersamaan masyarakat dan musyawarah serta semangat kekeluargaan.

Kedua yang demikian terlihat pada gerak partisipasi masyarakat pedesaan dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan tulang punggung pembangunan pedesaan di Indonesia dan yang membedakannya dengan pembangunan sektoral lainnya. Keberhasilan pembangunan pedesaan banyak ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa itu sendiri seperti program Manunggal Sakato di Sumatera Barat, Gersa Mata di Sulawesi Tenggara merupakan model-model pembangunan yang bermodalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian kebijaksanaan yang berlandaskan kepada partisipasi masyarakat merupakan kebijaksanaan yang sangat cocok dalam menggerakkan roda pembangunan di pedesaan.

Khusus bagi daerah Sumatera Barat yang merupakan salah satu propinsi di Indonesia, telah mengondol hadiah pembangunan tertinggi dari Presiden yaitu Prasmya Nugraha Pelita III. Hal demikian menunjukkan bahwa daerah Sumatera Barat telah berhasil meningkatkan pembangunan melebihi tingkat keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh propinsi lain di Indonesia pada saat yang bersamaan.

Gubernur Sumatera Barat secara gamlang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan yang dicapai di daerah ini adalah berkat kerja keras dan partisipasi masyarakat Sumatera Barat. Tanpa partisipasi masyarakat mustahil daerah ini akan memperoleh Prasangka Nugraha tersebut.

Dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat tersebut di Indonesia telah ada kelembagaan desa yang berperan untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan masyarakat. Adapun kelembagaan desa tersebut adalah LKMD dengan tugas pokok sebagai berikut :

- (a) Merencanakan pembangunan yang didasari atas musyawarah mufakat.
- (b) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa, partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya yang berasal dari masyarakat.
- (c) Menimbulkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan desa.

LKMD sebagai tatanan yang diintrodusir dari atas desa, yang melayani hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bidang sosial, ekonomi maupun politik dan aspek-aspek lainnya. Dalam kegiatannya lembaga tersebut membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan serta menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya masyarakat

dalam pembangunan.

LKMD berkedudukan baik di desa maupun di kelurahan, merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal, secara organisatoris lembaga ini berdiri sendiri. Pengurusnya terdiri dari pemuka pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga masyarakat yang ada di daerah teritorialal desa dan kelurahan. Dengan keberadaan LKMD yang demikian akan menjadikan lembaga tersebut sebagai sarana yang potensial dalam menggerakkan roda pembangunan melalui partisipasi masyarakatnya.

B. Masalah dan Perumusan

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa berbagai program telah dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah, namun dalam mewujudkan keberhasilan tersebut tentu tidak akan terlepas dari peran serta masyarakat. Masyarakat desa tergolong kepada lapisan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang relatif rendah, pendidikannya rendah dan cakrawala pikiran mereka masih sangat sederhana. Dengan demikian mereka kurang responsif terhadap pembaharuan. Disamping itu partisipasi mereka jarang yang datang secara spontan. Madrie (1986) mengemukakan bahwa pada umumnya partisipasi masyarakat desa berdasarkan kepada motivasi ekstrinsik yaitu adanya bimbingan, bantuan, dorongan yang kuat dari pihak luar ketimbang partisipasi yang datang secara spontan.

Untuk itu diperlukan sekali aktivitas LKMD sebagai

wadah partisipasi masyarakat untuk memberikan stimulan dan dorongan serta pengertian kepada masyarakat agar mereka dapat berperan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Kemampuan LKMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat akan menciptakan suasana harmonis dan kekeluargaan. Dengan suasana demikian akan tercipta pola hubungan peranan yang dinamis bagi setiap pribadi masyarakat dalam proses pembangunan yang pada gilirannya hal tersebut akan menciptakan perasaan memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap program pembangunan yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat adalah ciri utama dari pembangunan desa . Untuk itu melalui LKMD dapat ditumbuhkan partisipasi masyarakat secara terus menerus dan bukan partisipasi yang bersifat musiman dan bukanlah partisipasi yang dimobilisasi.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah penelitian seperti berikut.

↑ "Sejauh mana LKMD mampu berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pedesaan di Padang Pariaman ."/

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui realisasi pelaksanaan fungsi LKMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Sumatera Barat.
2. Dari hasil studi ini akan diperoleh informasi yang berhubungan dengan kendala yang dihadapi oleh lembaga

tersebut. dalam mengaktualisasikan fungsinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang mampu menerangkan keberadaan LKMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pedesaan di Sumatera Barat. Disamping itu dapat pula dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijaksanaan dalam rangka pembinaan LKMD di masa yang akan datang.



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Peranan

Peranan dapat diartikan sebagai pola perilaku yang tampak (overt behavior) pada seseorang atau lembaga dalam melakukan kegiatan tertentu (Rogers dan Schoemaker, 1962). Soekanto (1980) mengemukakan bahwa peranan adalah sebagai dinamisasi dari status. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya mereka dinamakan menjalankan peranan. Selanjutnya Soekanto (1980) menyatakan bahwa paling sedikit ada 3 hal yang mencakup spesifikasi dari peranan tersebut antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam suatu lembaga.
- b. Peranan adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perihal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat .
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi sistem struktur sosial.

Barlo (1960) membedakan pengertian peranan ke dalam empat macam pengertian yaitu :

- a. Rule Prescription yaitu rumusan peranan secara tertulis yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam sistem sosial.
- b. Rule Perception yaitu peranan seseorang terhadap sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan

peranan yang telah dirumuskan.

- c. Rule Performance yaitu peranan yang dapat ditampilkan oleh seseorang sehubungan dengan kedudukan yang dimilikinya.
- d. Rule Expectation yaitu peranan seseorang sesuai dengan kedudukannya, yang diharapkan oleh pihak lain dalam upaya untuk memperjuangkan suatu kepentingan.

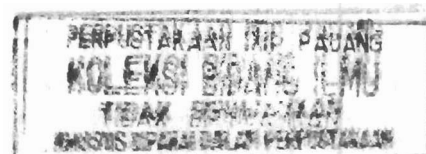
Agar seseorang atau lembaga untuk dapat berperan dengan baik dalam menunjang suatu kegiatan perlu adanya kesesuaian antara role prescription dengan role perception maupun role performance serta role expectation.

Margono Slamet (1981) mengemukakan bahwa ada empat ciri peranan yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga dalam membantu keberhasilan suatu kegiatan :

- a. Peranan yang diperlukan untuk kelangsungan pembangunan.
- b. Peranan yang belum dilakukan.
- c. Peranan yang akan dilakukan yang telah diketahui tetapi belum ada pelaksanaannya.
- d. Peranan tersebut dapat dilakukan oleh seseorang.

Sehubungan dengan keempat ciri peranan tersebut di atas Margono Slamet (1981) mengemukakan bahwa suatu lembaga berperanan sebagai berikut :

- a. Pemberi informasi
- b. Pemberi motivasi
- c. Pelancar proses defusi



- d. Penghubung antar sistim
- e. Pembimbing dan penggerak masyarakat ke arah yang diinginkan

2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi tersebut merupakan ciri utama pembangunan pedesaan yang membedakannya dengan pembangunan sektoral lainnya. Partisipasi masyarakat di pedesaan dikoordinasikan dalam suatu wadah LKMD yang dibentuk melalui Kepres No. 28 Tahun 1980. Dengan fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
2. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
3. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya masyarakat itu sendiri.
4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antara warga itu sendiri.
5. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
7. Meningkatkan peranan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Membina kegiatan antara lembaga yang ada di dalam masyarakat pembangunan.
9. Melaksanakan fungsi lain dalam rangka membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Bila dilihat LKMD dari segi fungsinya terbukti bahwa lembaga tersebut berfungsi sebagai "Agen of Change and Development" (Batten, 1976).

LKMD merupakan lembaga non struktural pedesaan yang bertugas membantu kepala desa dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh LKMD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di pedesaan melalui perpaduan antara pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Lembaga tersebut diharapkan mampu menghimpun potensi desa dan menjembatani antara lembaga formal dengan lembaga informal pada setiap program pembangunan baik yang datang dari atas maupun yang berasal dari bawah.

3. Partisipasi Dalam Pembangunan

Menurut Mubiyarto (1984) partisipasi merupakan kesediaan dalam membantu berhasilnya program pembangunan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingannya sendiri. Yadov (1980) mengemukakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan secara sukarela dan atas kemauan sendiri. Seterusnya Uphoff (1974) membedakan empat macam partisipasi dalam gerakan pembangunan yang terdiri dari : (1) partisipasi dalam perencanaan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan dan (4) partisipasi dalam mengamankan hasil pembangunan.

Bentuk partisipasi yang dilakukan individu dalam proses pembangunan akan berbeda sesuai dengan status sosial dan kedudukannya dalam sistim sosial. Tjondronegoro (1983) mengemukakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh need, motivasi, struktur sosial dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Orang akan melakukan sesuatu menyangkut dengan adanya kebutuhan akan kepuasan, mendapatkan keuntungan yang pada gilirannya akan meningkatkan statusnya. Bentuk partisipasi dapat berupa pengorbanan waktu, pemberian uang dan menyumbangkan materi lainnya.

Pada taraf pelaksanaan program pembangunan kelihatan partisipasi masyarakat relatif rendah bila program yang dilaksanakan itu adalah program yang berasal dari atas dan secara langsung kurang berkaitan dengan kebutuhannya.

Disisi lain Margono Slamet (1983) mengemukakan bahwa untuk terjadinya partisipasi diperlukan adanya kesempatan untuk berpartisipasi dan ada kemauan dari setiap individu untuk berpartisipasi. Memang partisipasi suatu bentuk khusus di dalam pembagian kekuasaan, tugas dan tanggung jawab di dalam suatu komunitas. Partisipasi berhubungan dengan perilaku dan kegiatan berpartisipasi dipengaruhi oleh unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kemauan, ketrampilan, ambisi dan lain sebagainya disamping itu dipengaruhi juga oleh suasana lingkungan (Beal, 1974).

Hasil-hasil pembangunan fisik berupa sarana dan

prasarana telah banyak memberikan peluang bagi masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi. Telah dibangunnya berbagai fasilitas, seperti sekolah, rumah sakit, irigasi dan sebagainya sering menimbulkan masalah untuk berpartisipasi dalam memanfaatkannya apalagi dalam mengamatkannya. Hal tersebut disebabkan oleh kemauan dan masih kurang pengetahuan maupun ketrampilan masyarakat desa dalam memanfaatkan dan memeliharanya. Hal tersebut merupakan salah satu kegagalan LKMD dalam mengintrodusir program-program pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Madrie (1985) partisipasi merupakan bentuk perilaku. Untuk berperilaku tertentu, minimal harus ada dua hal yang mendukung untuk berperilaku tersebut. Pertama harus ada unsur yang mendukung pada diri seseorang. Kedua terdapat iklim atau lingkungan yang memungkinkan terjadinya perilaku tertentu.

Bila partisipasi dikaitkan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program, akan tampak secara jelas enam macam partisipasi sebagai berikut :

a. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.

Seseorang sebelum menerima untuk melaksanakan sesuatu terlebih dahulu di dalam dirinya terjadi suatu proses mental. Dia mengadakan pertimbangan terhadap sesuatu yang diketahuinya mencoba memahaminya dan mencoba untuk mengerti serta memutuskannya. Dalam menerima dan berbuat sesuatu dia membutuhkan informasi tentang hal tersebut. Agar dia dapat memperoleh sesuatu tentu dia perlu berkomunikasi. Hal ini berarti adanya kesediaan untuk

membuka diri. Hansen (1972) menyebut adanya bentuk partisipasi "the provision of information". Adanya kesediaan mau mendengar, bersedia melihat, berusaha untuk mendapatkan keterangan serta berusaha untuk mengerti.

- b. Partisipasi dalam menyumbangkan pemikiran. Suatu informasi yang diterima akan menimbulkan suatu dorongan untuk memberikan tanggapan. Suatu informasi akan dapat diterima atau ditolak atas alasan tertentu. Untuk menanggapi, menyumbangkan pikiran perlu adanya kesediaan, kerelaan dan keberanian. Bagi masyarakat desa ada suatu kecenderungan untuk mengiyakan saja dan menerima apa yang disampaikan pimpinannya walaupun sebenarnya dia ingin untuk menolaknya. Gejala seperti itu terdapat pada masyarakat yang bersifat paternalistik.

Partisipasi menyumbangkan pemikiran berarti kesediaan untuk menanggapi suatu informasi yang diterimanya yang berasal dari luar. Partisipasi dalam menyumbangkan pemikiran berarti adanya kesediaan dalam memberikan informasi tentang sesuatu yang diketahuinya. LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat harus mampu memancing partisipasi yang demikian. LKMD bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan tetapi adalah sebagai subjek dari pembangunan yang dilaksanakan. Kegiatan LKMD dalam hal ini menumbuhkan rasa percaya diri bagi masyarakat dalam menanggapi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan.

c. Partisipasi dalam merencanakan suatu kegiatan. Merencanakan adalah proses awal dari suatu kegiatan. Dalam proses ini menyangkut dengan penetapan sasaran dan menentukan alternatif kegiatan yang akan dikerjakan. Proses

Pembangunan pedesaan yang dikelola oleh LKMD seyogiannya mengikut sertakan masyarakat sejak dari taraf perencanaan sampai kepada taraf pemeliharaan. Dengan cara demikian akan terangkat ke permukaan apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat tersebut. Bila masyarakat diikut sertakan sejak dari perencanaan akan mempunyai dampak yang sangat baik sekali bagi masyarakat itu sendiri. Bagi mereka akan timbul rasa dihargai, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan. Pada gilirannya hal tersebut akan memperlancar akselerasi pembangunan (Rein, 1966). Partisipasi dalam memutuskan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Uphof (1977) disebut "Participation in decision making".

d Partisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Partisipasi dalam pelaksanaan oleh Matte (1979) disebut sebagai "Participation of Inplemantation". Pada tingkat pelaksanaan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa pemberian sesuatu terhadap kegiatan yang dilaksanakan berupa uang maupun tenaga dsb. Partisipasi dalam pelaksanaan pada umumnya partisipasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat melalui wadah LKMD dengan berbagai pola seperti di Sumatera Barat dikenal dengan

konsep Manunggal Sakato. Tetapi seyogianya LKMD jangan hanya mampu memobilisasi partisipasi masyarakat tetapi secara lebih jauh harus mampu menanamkan kesadaran bagi mereka dan menjauhkan segala bentuk penekanan, paksaan dsb.

- e. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan. Partisipasi pada tingkat ini menyangkut dengan kemungkinan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat. Untuk itu masyarakat harus dapat mengisi peluang untuk beraktivitas sehubungan dengan program yang dilaksanakan. Sepertinya telah dibangun MCK bagaimana upaya agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal, tidak jarang terjadi di pedesaan telah dibangun proyek sanitasi lingkungan berupa jamban sehat namun masyarakat tetap membuang hajatnya disembarang tempat. Hal ini beralasan jamban sehat itu belum familier dengan mereka. Dalam hal tersebut LKMD harus mampu mengintroduksir kepada masyarakat melalui pendekatan persuasif edukatif, bagaimana masyarakat untuk dapat mengambil manfaat dari proyek tersebut. Menurut Uphoff (1977) partisipasi pada tingkat ini disebut "Participation of benafide" dan Yudov (1980) sebagai "Participation in Sharing the Benafide of Development".
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan. Setelah proyek kegiatan selesai dilaksanakan kegiatan tersebut akan mempunyai keluaran dalam bentuk fisik atau non fisik. Masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi untuk

menilai sejauh mana proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka dan apakah proyek tersebut dapat mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Partisipasi semacam ini adalah sangat penting bagi pemerintah sebagai bahan masukan untuk perbaikan dimasa datang. LKMD sebagai wadah partisipasi harus mampu menerima partisipasi masyarakat pada tingkat ini dan kadang-kadang partisipasi seperti ini dianggap sebagai kritikan oleh sementara orang. Uphoff (1977) menyebut sebagai "Participation in Monitoring and Evaluation of Development Program and Project".

Menurut Neher (1974) dalam pelaksanaan partisipasi dapat dibedakan atas partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi secara vertikal dapat diartikan keikutsertaan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan program pembangunan yang berasal dari pemerintah, sedangkan partisipasi secara horizontal dapat diartikan sebagai keswadayaan dan prakarsa masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

B. Hipotesis

Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian serta tinjauan teoritis yang telah dikemukakan pada bagian ini dapat diajukan hipotesis penelitian seperti berikut.

"LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat mampu berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pedesaan di Padang Pariaman".



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Ruang lingkup studi ini adalah LKMD di wilayah Kabupaten Padang Padang Pariaman yang tersebar pada 475 desa/ kelurahan. Semua desa tersebut terletak pada lima belas kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Populasi Penelitian

Kecamatan	Desa/Kelurahan
1. Sei. Geringging	15
2. Sei.Limau	29
3. V Koto Kamp. Dalam	51
4. Pariaman Utara	29
5. Pariaman Tengah	35
6. Pariaman Selatan	21
7. Nan Sabaris	69
8. VII Koto	69
9. 2 X 11.Enam Lingkung	59
10. Lubuk Alung	38
11. Batang Anai	20
12. Sipora	10
13. Siberut Selatan	10
14. Siberut Utara	10
15. Pagai Utara	10
Jumlah	475

2. Sampel

Mengingat keterbatasan dana dan waktu, kegiatan studi ini dibatasi untuk beberapa LKMD di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan LKMD-LKMD yang akan dijadikan sebagai sampel dalam studi ini. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode "Multi Stage Sampling" yang terdiri dari beberapa tahap :

Tahap I membagi daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan konsep homogeneous region (berdasarkan kesamaan mata pencaharian, sosial budaya) menjadi empat region yaitu region A, B, C dan D. Region A terdiri dari tiga kecamatan yaitu : Sei. Geringging, Sei Limau dan Lima Koto Kampung Dalam. Region B terdiri dari Pariaman Utara, Pariaman Tengah dan Pariaman Selatan. Region C terdiri dari Kecamatan Nan Sabaris, Kec. VII Koto , 2 X 11 Enam Lingkung , Kec. Lubuk Alung dan Kec. Batang Anai. Region D terdiri dari Kecamatan Sipora, Kec. Siberut Selatan dan Siberut Utara.

Tahap II menetapkan secara purposive satu kecamatan dari masing-masing region, kecuali region D. Untuk itu region A ditetapkan Kecamatan Sei. Limau, region B Kecamatan Pariaman selatan dan region C Kecamatan Nan Sabaris.

Tahap III Penentuan sampel LKMD/Desa dilakukan secara proporsional sampling yaitu mengambil 30 persen sampel

dari masing-masing kecamatan terpilih sebagai sub populasi. Untuk itu region A sebanyak 9 desa, region B sebanyak 21 desa dan region C sebanyak 6 desa.

B. Konsep Peubah Dan Pengukuran

Dalam studi ini akan dicoba untuk melihat pengaruh antara peranan LKMD sebagai bebas dengan partisipasi masyarakat sebagai peubah terikat. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan konsep yang digunakan, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan pengertian beserta indikator pengukurannya.

1. Peranan LKMD adalah aktivitas dari LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengaktualisasikan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kepres No. 28 tahun 1980). Pengukuran peubah ini dilakukan dengan menjabarkan fungsi LKMD menurut peraturan kedalam beberapa pertanyaan. Masing pertanyaan diukur dengan menggunakan skala liker dengan rentangan 1 -5.
2. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap gerakan pembangunan pedesaan baik dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik. Pengukuran peubah ini dilakukan dengan menggunakan tiga indikator antara lain :
 - a. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik
Hal ini dapat diukur dengan menghitung persentase keikutsertaan masyarakat bila dibandingkan dengan nilai total proyek yang dilaksanakan.

- b. Keikutsertaan masyarakat dalam menunjang program Keluarga Berencana. Hal ini diukur dengan prosentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor Keluarga Berencana.
- c. Kesiediaan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini diukur dengan menghitung pencapaian target pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Untuk mengetahui nilai peubah partisipasi dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata hitung dari ketiga indikator di atas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam studi adalah data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang berhubungan dengan keberadaan LKMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Data yang berhubungan yang hal tersebut dikumpulkan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan melalui 10 orang informan. Informan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) 3 orang pengurus LKMD
- (2) 2 orang tokoh masyarakat sebagai informal leader
- (3) 1 orang pengurus Karang Taruna
- (4) 1 orang pengurus pemuda
- (5) 1 orang pengurus pos KB Desa
- (6) 1 orang pengurus Posyandu
- (7) 1 orang pengurus PKK

2. Data Skunder, data yang berhubungan dengan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk masing-masing indikator, dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dokumentasi dan wawancara melalui Kepala desa atau Sekretaris.

D. Teknik Analisis

Setelah data diperoleh dan diolah, dalam analisis akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Diskripsi Data

Data yang telah diolah (ditabulasi) terlebih dahulu disajikan selengkapnya dalam bentuk tabel distribusi. Disamping itu diberikan juga penafsiran dari masing-masing peubah sepanjang tidak menyimpang

2. Estimasi

Sehubungan dengan tujuan penelitian yaitu melihat peranan LKMD sebagai peubah bebas dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sebagai peubah terikat. Untuk hal tersebut dalam penelitian ini digunakan model statistik Regresi Sederhana dengan menggunakan pendekatan Ordinary Least Square. Hubungan antara peubah bebas dengan peubah terikat dapat dilihat pada model di bawah ini.

$$Y = B_0 + B_1X_1 + e$$

dimana :

Y = Partisipasi Masyarakat

B₀ = Intersep garis regresi

B₁ = Nilai parameter penduga .

e = Disturbance error

$X_1 =$ Peranan LKMD

3. Koefisien Diteriminasi

Untuk mengetahui kontribusi (share) dari peubah bebas terhadap keragaman peubah terikat digunakan model berikut.

$$r^2 = \frac{\text{Jumlah kuadrat Total Regresi}}{\text{Jumlah Kuadrat Total Terkoreksi}}$$

E. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada studi ini digunakan model statistik seperti berikut.

$$F = \frac{JK (\text{Reg}) / k}{JK (s) n - k - 1}$$

dimana :

k = Banyak peubah bebas

n = Ukuran sampel



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dikemukakan analisis dalam dua bentuk. Pertama, analisis umum yang juga disebut analisis satu peubah. Analisis ini menggunakan pendekatan statistik dengan model-model statistik elementer. Misalnya deskripsi dari tabel distribusi frekuensi. Kedua, analisis uji hipotesis, juga dengan menggunakan pendekatan statistik dilaksanakan dengan model regresi sederhana.

1. Analisis Umum

Dalam analisis ini kajian dari masing-masing peubah baik peubah terikat maupun peubah bebas. Misalnya aktivitas LKMD yang dalam studi ini berperan sebagai peubah bebas dan gerakkan partisipasi masyarakat desa yang berperan sebagai peubah terikat.

a. Aktivitas LKMD

Untuk mengungkapkan keadaan peubah aktivitas LKMD sebagai peubah bebas dalam studi ini adalah berdasarkan jawaban-jawaban yang diterima dari responden yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada jabaran fungsi-fungsi LKMD menurut Kepres No.28 tahun 1980. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam bentuk statement yang jawabannya ...



langsung dengan rentangan 1 s/d 5 menurut model skala Likert. Jumlah pertanyaan adalah 10 materi pertanyaan dengan skor jawaban tertinggi adalah 50. Gambaran distribusi skor yang diperoleh dari lapangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Aktivitas LKMD di Desa Contoh di Kab.Pd.Pariaman

Kelas Interval.	X	F	%	FX	$(X-\bar{X})$	$(X-\bar{X})^2$	$F(X-\bar{X})^2$
18-21	19,5	2	8	39	-9,28	86,13	172,24
22-25	23,5	6	24	141	-5,28	27,88	167,27
26-29	27,5	6	24	165	-1,28	1,64	9,83
30-33	31,5	5	20	157,5	2,72	7,40	36,99
34-37	35,5	5	20	177,5	6,72	45,15	225,79
38-41	39,5	1	4	39,5	10,72	114,9	114,92
-	-	25	100,	719,5	--	--	727,04

$$\bar{X} = \frac{\sum FX}{N} = 28,78$$

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum F(X-\bar{X})^2}{n-1}}$$

$$= 1,124$$

Tabel 2, di atas secara umum menggambarkan bahwa Skor aktivitas rata-rata dari LKMD adalah 28,78 sedangkan skor tertinggi adalah 50. Dalam hal ini



berarti kegiatan LKMD dibanding dari kegiatan yang maksimal sebesar 57,56. Jadi berarti fungsi LKMD baru tercapai 57,56 %, relatif di atas level sedang atau dalam taraf relatif mendekati kurang giat. Begitu pula koefisien Standard deviasi yang besar koefisiennya hanya 1,128, merupakan koefisien yang sangat kecil kalau dibanding dengan nilai \bar{X} . Kondisi ini menunjukkan relatif kurang beragamnya sebaran data bersangkutan atau dengan perkataan lain tidak banyak berbeda tingkat aktivitas LKMD di desa-desa Kabupaten Padang Pariaman. Namun demikian dari angka persentase terlihat terlihat skor 26 ke atas yakni sejumlah 68%, ini merupakan kegiatan LKMD lebih dari 50% dari seluruh kegiatan yang ditetapkan, dan berarti pula LKMD bersangkutan sudah cukup aktif dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Gerakkan Partisipasi Masyarakat

Gerakkan partisipasi masyarakat di ukur dengan 3 jenis proyek pembangunan yang diukur dengan angka persentase, yakni persentase rata-rata dari tiga jenis kegiatan pembangunan yang tergambar dalam contoh perhitungan sebagai berikut :

- Nilai pembangunan fisik yang digerakkan atas swadaya masyarakat saja	40%
- Jumlah aseptor dibanding dengan PUS	60%
- Persentase pencapaian PBB	<u>80%</u>
Rata-rata swadaya $180\% : 3$	<u>60%</u>

Jadi nilai atau skor gerakan partisipasi masyarakat yang tertinggi adalah 100/ 100% yaitu berupa persentase rata-rata dari tiga unsur obyek pembangunan seperti di atas. Untuk melihat gambaran distribusi data dari skor gerakan partisipasi masyarakat ini, dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini :

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Skor Gerakan Partisipasi Masyarakat di Desa Contoh Kabupaten Padang Pariaman.

Interval Kelas	X	F	%	FX	$(X-\bar{X})$	$(X-\bar{X})^2$	F $(X-\bar{X})^2$	Ket
36-45	40,5	1	4	40,5	-28,5	806,56	806,56	
46-55	50,5	2	8	101,-	-18,4	338,56	677,12	
56-65	60,5	6	24	363	- 8,4	70,56	423,36	
66-75	70,5	7	28	493,5	1,6	2,56	17,92	
76-85	80,5	9	36	724,5	11,6	134,56	1211,04	
	-	25	100	1722,5	-	-	3136,-	

$$\bar{X} = \frac{\sum FX}{N} = \frac{1722,5}{25} = 68,9$$

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum F(X-\bar{X})^2}{N}} = \frac{3136}{25} = 11,2$$

Berdasarkan gambaran dan analisis Tabel 3, di atas dapat dikemukakan suatu deskripsi dan beberapa interpretasi sebagai berikut.

Rata-rata skor gerakan partisipasi masyarakat di de -

sa contoh adalah 68,9. Ini berarti gerakan pranserta masyarakat terhadap pembangunan berada pada level cukup, karena yang dimaksud dengan angka rata-rata 68,9 tersebut adalah gerakan partisipasi berada pada 68,9% dari yang diharapkan/partisipasi penuh.

Kemudian ditinjau dari angka standar deviasi atau penyimpangan baku hasil analisis memperoleh koefisien standar deviasi sebesar 11,2. Sedangkan nilai $\bar{X} = 68,9$. Dalam hal ini berarti skor gerakan partisipasi relatif kurang beragam.

Kemudian kalau diperhatikan secara lebih terperinci, tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas partisipasi masyarakat berada pada nilai cukup yakni sejumlah 88%, sedangkan yang memiliki skor kurang hanya sejumlah 12% saja atau 3 desa - dari 25 desa yang dijadikan sampel. Namun demikian tingginya pranserta masyarakat terhadap gerakan pembangunan di pedesaan kabupaten Padang Pariaman, belum pasti akibat pengaruh aktivitas LKMD. Atau apakah gerakan itu akibat dampak aktivitas-aktivitas LKMD ?. Untuk menjawab hal ini, maka sub bab-bab berikutnya akan memperlihatkan atau menjawab hal itu secara empiris.

2. Uji Hipotesis

Dalam sub bab ini akan dikemukakan tiga bentuk analisis :



- Analisis estimasi koefisien regresi
- Analisis uji t-test
- Analisis r dan analisis uji F-rasio.

Estimasi Koefisien Regresi dan Pengujian

Analisis estimasi koefisien regresi telah ditetapkan pada metode penelitian bahwa untuk ini digunakan model pendekatan OLS, dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = B_0 + BX + E$$

Analisis selanjutnya ditunjukkan oleh tabel 4 berikut ini yang merupakan olahan komputerisasi:

Tabel 4. Analisis Regresi Aktivitas LKMD dan Gerakan Partisipasi Masyarakat Desa di Kabupaten Padang Pariaman.

<u>Peubah</u>	<u>Koefisien Regresi</u>	<u>STD.Error</u>	<u>T(Df=23)</u>	<u>Prob</u>
X1	0,040	0,452	0,087	0,93104
B ₀	70,505	--	--	--

$$R^2 = 0,018$$

Dari tabel 4, di atas, terlihat koefisien regresi X1 adalah 0,04 atau 4%. Dalam hal ini berarti

peningkatan satu unit aktivitas LKMD hanya dibarengi dengan peningkatan 0,04 unit gerakan partisipasi masyarakat desa terhadap proses pembangunan desa. Dari kondisi ini jelaslah bahwa aktivitas LKMD kurang berkaitan atau kurang menyumbang terhadap gerakan partisipasi masyarakat desa pada pembangunan desa. Dengan jelas akan kelihatan dalam substitusi persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 70,505 + 0,04 X$$

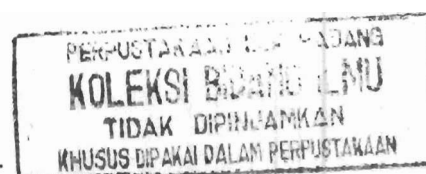
Dari persamaan tersebut terlihat sedikit sekali - tambahan gerakan partisipasi masyarakat yang disebabkan aktivitas LKMD, sedangkan sebelum ada aktivitas LKMD besar gerakan partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh koefisien B_0 sebesar 70,505. Dengan demikian jelaslah tambahan partisipasi masyarakat setelah adanya kegiatan LKMD kecil sekali.

Kemudian dilanjutkan dengan tingkat keberartian parsial dari pengaruh aktivitas LKMD ini dengan melihat nilai t , hasil penglahan. Dari tabel 4 ternyata nilai t diperoleh hanya 0,087 dengan probability sebesar 0,93104. Ini berarti menunjukkan tidak ada keberartian pengaruh aktivitas LKMD terhadap gerakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desanya.

Begitu juga kalau ditinjau dari hasil analisis F - rasio yang dalam model regresi sederhana antara t dengan F tidaklah berbeda. Namun demikian peneliti ingin juga secara data mengemukakan analisis tersebut. Dalam hal ini dapat ditambahkan bahwa perbedaan t dengan f pada ketepatan pemakaiannya. Kalau sifat sebaran datanya relatif normal maka lebih tajam uji t dipergunakan, tetapi kalau sebaran datanya tidak normal sudah tentu uji F yang lebih tepat dipergunakan. Dalam penelitian ini penulis tidak menguji kenormalan data tersebut, maka penulis melakukan kedua pengujian tersebut, ternyata antara t dan F mempunyai koefisien yang sama dan koefisien probabilitas yang sama pula.

Jadi berdasarkan kedua pengujian di atas jelaslah terbukti tidak ada pengaruh yang berarti nyata dari Aktivitas LKMD terhadap Gerakan Partisipasi Masyarakat pada proses pembangunan desa.

Hal tersebut diatas lebih nyata lagi kalau dilihat dari nilai r , dimana besaran nilai r hanya 0,018. Ini berarti kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat hanya sebesar 1,8%. Dengan perkataan lain sumbangan atau Aktivitas LKMD hanya dapat menyumbang Gerakan Partisipasi Masyarakat hanya sebesar 1,8% saja.



B. P e m b a h a s a n

Dalam studi ini dijabarkan 10 jenis Aktivitas LKMD yang tersimpul dalam tiga fungsi LKMD menurut Kepres No. 28 tahun 1980, dimana dinyatakan bahwa LKMD LKMD berfungsi sebagai berikut :

1. Perencana dalam pembangunan desa
2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan desa.

Dengan mengacu kepada tiga tugas dan fungsi di atas , maka disusun instrumen yang jawabannya diberi nilai - tertinggi 50. Dilapangan ditemui bahwa dari 25 buah LKMD dg desa, memiliki nilai rata-rata hanya 28,78, ini menunjukkan bahwa aktivitas LKMD hanya pada taraf cukup.

Sedangkan di lain pihak skor gerakan partisipasi masyarakat yang jumlah skor tertinggi 100% , sedangkan skor rata-rata yang ditemui di lapangan hanya 68,9% , juga sama halnya dengan nilai rata-rata aktivitas LKMD yang terleak pada taraf cukup, Kalau sepintas lalu, nampaknya kedua nilai rata-rata tersebut seakan-akan berkaitan karena sama -sama memiliki bobot nilai yang sama besar. Tetapi dipandang dari segi materi kegiatan sama sekali hampir tidak ada kaitan .

Hal ini telah dibuktikan oleh analisis data yang berupa uji hipotesis, dimana koefisien regresi X terlihat sangat kecil sekali hanya 0,04. Jadi berarti bahwa semua ke -



giatan yang dilaksanakan dengan jumlah aktivitas rata-rata $28,78/50 \times 100\% = 57,56\%$, itu hanya dapat meningkatkan gerakan partisipasi masyarakat sebesar empat persen saja. Hal ini dibuktikan dengan uji t dan f yang terbukti sangat tidak signifikan dan begitu juga koefisien korelasi diterminasinya atau R^2 sangat kecil sekali dengan menunjukkan angka 0, 018 atau 1,8% yang berarti peranan semua kegiatan atau aktivitas LKMD yang dinyatakan sebesar 57,56% dari jumlah kegiatan yang diharapkan, hanya memberikan sumbangan terhadap gerakan partisipasi masyarakat sebesar 1,8 % saja.

Jadi menurut dugaan penulis kegiatan yang dilakukan oleh lembaga LKMD nampak tidak mengena pada sasaran. Di samping itu dari informasi lapangan diperoleh bahwa aktivitas LKMD terlihat sangat periodik, dalam arti kegiatan dilaksanakan secara musiman, pada waktu adanya fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Misalnya disaat bantuan Bangdes diterima untuk sekali setahun. Saat itulah LKMD mengadakan kegiatan untuk membuat program pelaksanaan kerja masyarakat, dan juga waktu giliran manunggal sakato berikut ABRI masuk desa disaat itu munculah anggota LKMD dengan segala program pelaksanaannya. Jadi fungsi perencanaan dan fungsi menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat tidak digiatkan sama sekali, mereka berperan sebagai pelaksana Top down Planning saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. K e s i m p u l a n

1. Dua peubah yang dianalisis dalam studi ini yang di-ramalkan memiliki hubungan fungsional, ternyata tidak terbukti. Aktivitas LKMD sebagai peubah bebas dan gerakan partisipasi masyarakat sebagai peubah terikat dalam bobot skor penilaian sama-sama memperoleh nilai rata-rata pada level cukup, tetapi kedua peubah tersebut tidak menunjukkan gejala yang saling berkaitan/ fungsional.
2. Tiga materi kegiatan partisipasi masyarakat terhadap aspek pembangunan yakni, kegiatan KB, kegiatan partisipasi langsung terhadap proyek-proyek pembangunan, dan partisipasi dalam pembayaran pajak, ternyata semua peningkatan kegiatan itu sedikit sekali merupakan dampak aktivitas LKMD, makanya keberadaan LKMD dapat dinyatakan tidak berfungsi sama sekali.
3. Aktivitas LKMD dilaksanakan sangat priodik dan musiman. Pada umumnya aktivitas itu nampak pada saat Bantuan desa datang atau tibanya giliran manunggal saka-to dan ABRI masuk desa.

4. Berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan di atas, dapat dinyatakan bahwa personil LKMD yang katanya dipilih - rakyat, kelihatannya relatif belum mengerti dan memahami betul Kepres No.28 tahun 1980. Dalam arti belum memahami tujuan dan fungsi keberadaan LKMD sebagai suatu lembaga pendamping pemerintahan desa.

B. S a r a n - s a r a n

1. Berkaitan dengan kesimpulan No.4, peneliti menyarankan agar diberi pengertian secara sungguh-sungguh dan mendalam mengenai keberadaan LKMD sebagai lembaga pendamping lembaga pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk melaksanakan saran nomor 1, tersebut, sebaiknya diadakan semacam penataran mengenai sekitar pengertian-pengertian terhadap Kepres No.28 tahun 1980, disamping itu melatih anggota LKMD agar terampil menyusun :
 - a. Perencanaan desa
 - b. Membuat program penyuluhan-penyuluhan pembangunan terhadap masyarakat desa.
 - c. Teori kepemimpinan desa, dan sebagainya yang berkaitan dengan peranan sebagai seorang tokoh pembangunan di pedesaan.

====oOo====



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anomius, (1983) Pedoman Teknik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa dan Kelurahan, Direktorat Pemerintahan daerah Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- _____, (1986) Manual Peranan LMD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri Jakarta.
- _____, (1988) Pemerintahan Desa, laporan penelitian, Balitbang Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Anwar, Arsyad, (1985) Prospek dan Permasalahan Ekonomi Pedesaan Indonesia, Ghalia , Jakarta.
- Bryant, Carolie, (1982) Managing Development in The Third World, Wesview Press, Colorado.
- Esman, (1979) Local Organization and Rural Development, Cornell University Press, New York.
- Hansen, (1981) Managemen Pembangunan Desa, Grafindo, Jakarta.
- Hanafiah, (1985) Pendekatan Wilayah Terhadap Masalah Pembangunan, IPB Bogor.
- Jhansen, (1970) Teknik-Teknik Pengembangan Masyarakat, Institut Pembangunan Masyarakat, Malang.

- Neher, (1974). The Dynamics of Politics and Administration in Rural Thailand, Center for International Studies, Ohio.
- Nasir, Moh, (1983). Metode Penelitian, Galia Indonesia, Jakarta.
- Sudirwo, Daeng, (1985). Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, Angkasa Bandung.
- Sujana, (1983). Teknik-Teknik Analisis Regresi dan Korelasi, Tarsito, Bandung.
- Tuckman, Cs, (1980). Conducting Educational Research, Harcourt Bruce Jovanovich, INC New York.
-

PERANAN LKMD DALAM MENGGERAKAN PARTISIPASI

HEADER DATA FOR: B:NASRUL LABEL:
NUMBER OF CASES: 25 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	Y
1	33.000	35.420
2	26.000	75.000
3	27.000	80.000
4	25.000	68.000
5	27.000	75.000
6	19.000	58.000
7	34.000	68.000
8	36.000	65.500
9	34.000	80.000
10	25.000	65.000
11	26.000	78.000
12	25.000	80.000
13	25.000	80.000
14	40.000	80.000
15	36.000	52.500
16	18.000	75.000
17	27.000	60.000
18	25.000	73.800
19	30.000	76.000
20	30.000	73.800
21	31.000	80.000
22	28.000	65.250
23	35.000	63.750
24	22.000	46.360
25	30.000	80.000